

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan Teori Keagenan atau *Agency Theory* sebagai landasan teori penelitian. Teori ini memberikan kerangka teori untuk memahami proses pengambilan keputusan di dalam organisasi dan dinamika antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen). Teori keagenan, yang dikembangkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menjelaskan bagaimana prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas-tugas atas nama mereka.

Kontrak mengharuskan agen untuk berperilaku demi kepentingan terbaik prinsipal, dan prinsipal memberi imbalan kepada agen karena telah melakukannya. Konflik keagenan muncul ketika prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Hal ini terjadi ketika agen tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan harapan prinsipal, yang dapat mengakibatkan keputusan yang tidak optimal bagi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teori keagenan sangat penting untuk menganalisis dan mengelola hubungan ini secara efektif, guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Manajemen perusahaan, termasuk *chief executive officer* (CEO), bertindak sebagai perwakilan pemilik atau pemegang saham, yang dianggap sebagai prinsipal. Sebagai contoh, prinsipal dapat mendelegasikan tanggung jawab

pengambilan keputusan dari pemegang saham kepada *chief executive officer* (CEO) selaku agen akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Dalam teori ini, sangat menekankan bahwa pentingnya pemisahan kepentingan antara prinsipal dan agen. Karena tidak selamanya pemegang saham dan CEO memiliki kepentingan yang sama dan pasti ada perbedaan kepentingan atau opini maka muncul konflik antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.

Seiring berkembangnya perusahaan, dapat terjadinya pertentangan apabila agen tidak menjalankan aturan dari prinsipal karena perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan dan tujuan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan *agency conflict*.

Konflik dalam teori keagenan sering kali terjadi karena perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Pemilik perusahaan biasanya berfokus pada peningkatan nilai perusahaan dan pengembalian investasi, sementara manajer mungkin lebih tertarik pada pengembangan karir, bonus, dan kompensasi yang lebih tinggi. Ketika manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan kompensasi mereka, mereka mungkin terlibat dalam praktik yang tidak sejalan dengan kepentingan pemilik, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menciptakan dilema bagi pemilik, yang harus memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan mereka.

Salah satu faktor yang memengaruhi konflik dalam teori keagenan adalah informasi asimetris. Manajer memiliki akses lebih besar terhadap informasi internal perusahaan dibandingkan dengan pemilik. Ketika manajer menggunakan informasi

ini untuk keuntungan pribadi, mereka dapat mengambil keputusan yang merugikan pemilik. Misalnya, manajer mungkin memilih untuk melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan.

Faktor lain yang memengaruhi konflik dalam teori keagenan adalah struktur insentif. Jika insentif yang diberikan kepada manajer tidak selaras dengan tujuan pemilik, maka manajer mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam praktik yang merugikan. Misalnya, jika manajer diberikan bonus berdasarkan laba bersih, mereka mungkin terdorong untuk melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merancang sistem insentif yang mendorong manajer untuk bertindak demi kepentingan pemilik.

Hubungan teori keagenan dengan *tax avoidance* dapat kita lihat dengan ilustrasi berupa agen yang memanfaatkan sistem perpajakan *self assessment system* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih kecil. Jumlah pajak penghasilan juga meningkat ketika laba besar. Untuk menghindari penurunan kompensasi kinerja prinsipal, agen akan berusaha untuk mengendalikan beban pajak. Manajemen (agen) yang memiliki akses langsung ke informasi perusahaan akan menyembunyikan informasi ini dari prinsipal, yang menyebabkan asimetri informasi. Jika prinsipal tidak dapat mengawasi agen untuk memastikan bahwa mereka mengikuti instruksi prinsipal, maka konflik akan meningkat.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Praktik *tax avoidance* merupakan cara perusahaan dalam meminimalisir beban pajak untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan celah aturan dan perundang-undangan perpajakan sehingga dianggap cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengacu pada langkah-langkah yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah. *Tax avoidance* berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum karena praktik ini sering kali melibatkan perencanaan pajak yang teliti serta penerapan strategi yang sah untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung.

Salah satu motivasi utama bagi perusahaan untuk terlibat dalam *tax avoidance* adalah untuk meningkatkan profitabilitas. Dengan mengurangi kewajiban pajak, perusahaan dapat melaporkan laba bersih yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Hal ini menciptakan insentif bagi manajemen untuk mencari cara-cara yang sah dalam mengurangi pajak yang harus dibayarkan.

Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk penggunaan struktur perusahaan yang kompleks, pemindahan laba antar negara (*transfer pricing*), serta pemanfaatan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, perusahaan multinasional sering kali memanfaatkan perbedaan tarif pajak di berbagai negara karena tarif pajak yang bervariasi di setiap

yurisdiksi, perusahaan multinasional sering kali merelokasi keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Beban pajak keseluruhan pada bisnis dapat dikurangi jika hal ini dilakukan.

Dalam konteks teori keagenan, penghindaran pajak dapat dipahami sebagai akibat dari konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen). Manajer mungkin terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan laba bersih yang dilaporkan, sehingga memperoleh bonus atau insentif lainnya. Namun, tindakan ini dapat menimbulkan risiko reputasi dan potensi sanksi dari otoritas pajak, yang pada akhirnya dapat merugikan pemilik.

Profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan keberadaan komisaris independen adalah beberapa elemen yang mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan yang lebih menguntungkan biasanya memiliki motivasi lebih untuk mengendalikan kewajiban pajak mereka. Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi mungkin lebih cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak, karena bunga utang sering kali dapat dikurangkan dari pajak.

Kepemilikan saham oleh manajer dalam sebuah perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap strategi pengelolaan pajak. Manajer yang juga pemegang saham sering kali memiliki dorongan untuk menyusun struktur pajak yang lebih efisien guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dorongan ini muncul karena mereka memiliki kepentingan langsung dalam peningkatan nilai perusahaan, yang dapat dicapai dengan mengurangi beban pajak. Namun, ketika manajer memiliki porsi kepemilikan yang besar, mereka cenderung lebih berhati-

hati dalam mengambil langkah-langkah yang dapat menimbulkan risiko hukum atau merusak reputasi perusahaan. Kepemilikan yang substansial ini mendorong mereka untuk memastikan bahwa strategi penghindaran pajak yang diterapkan tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga sesuai dengan standar etika yang tinggi.

Di sisi lain, manajer dengan kepemilikan saham yang signifikan sering kali lebih berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas perusahaan. Mereka mungkin lebih memilih untuk menghindari strategi penghindaran pajak yang agresif yang dapat memberikan keuntungan jangka pendek tetapi berpotensi merugikan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai alat pengawasan internal yang efektif, mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang berisiko. Hal ini menciptakan keseimbangan antara upaya untuk meminimalkan pajak dan menjaga integritas serta reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.

Komisaris independen meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, sehingga mengurangi penghindaran pajak. Komisaris independen yang efektif dapat mendorong manajemen untuk bertindak lebih etis dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap praktik penghindaran pajak yang tidak etis.

Penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Perusahaan dapat menghindari pajak karena adanya manfaat atau pengurangan

pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan perpajakan yang tidak hanya mendorong investasi tetapi juga memastikan kepatuhan pajak yang tinggi.

Akhirnya, penghindaran pajak dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ketika perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak, pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah berkurang, yang dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai program-program sosial dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang penghindaran pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya sangat penting untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung dengan membagi beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak, dapat digunakan untuk mengukur tingkat *tax avoidance*. Tingkat rasio ETR yang semakin rendah maka semakin tinggi kemungkinan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi ETR maka semakin rendah perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

2.1.3 Profitabilitas

Faktor pertama dalam mengukur tingkat penghindaran pajak adalah profitabilitas. Kemampuan sebuah bisnis untuk menghasilkan laba dari operasinya dikenal sebagai profitabilitas. ROA (*return on assets*) adalah salah satu dari banyak rumus yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Selain mengukur efisiensi perusahaan, dan ROA juga dapat digunakan untuk mengukur laba bersih

perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan, yang mengarah pada manajemen aset yang lebih baik dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Menurut teori keagenan, pemilik dan agen sering kali memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Manajer ingin meningkatkan profitabilitas sebagai agen, dan mengurangi beban pajak adalah salah satu cara untuk melakukannya. Menghindari pajak adalah salah satu pendekatan untuk mencapai hal ini, yang menurunkan kewajiban pajak perusahaan dan meningkatkan profitabilitas. Akibatnya, entitas bisnis yang lebih menguntungkan memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak.

2.1.4 Leverage

Kemudian faktor kedua yang dianggap dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan kemampuan modal perusahaan untuk menjalankan usahanya yang berasal dari hutang. Perusahaan atau entitas yang mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan akan menimbulkan biaya-biaya yang terkait dengan utang tersebut, seperti beban bunga; semakin besar *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka semakin banyak utang yang dimiliki, dan semakin tinggi beban bunganya, sehingga akan menurunkan laba entitas tersebut dan menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan teori keagenan, seringkali entitas berusaha untuk membuat kinerjanya terlihat lebih baik. Oleh karena itu, entitas dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan pendanaan melalui utang.

Terdapat beberapa ukuran yang digunakan untuk *Leverage*, salah satunya adalah Debt to Equity Ratio (DER). DER adalah proksi yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dibiayai oleh total hutang perusahaan.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajer perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan yang akan berpengaruh penting bagi perusahaan dengan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dengan adanya kepemilikan saham, manajer ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan kelangsungan operasional perusahaannya. Jika dihubungkan dengan teori keagenan, kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme untuk mengurangi *agency conflict* karena manajer yang memiliki saham di perusahaan dianggap memiliki insentif yang lebih kuat untuk bertindak selaras dengan kepentingan pemilik atau prinsipal. Dengan adanya kepentingan finansial yang langsung terkait dengan kinerja perusahaan, manajer menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada nilai saham yang mereka miliki.

Kepemilikan manajerial juga berperan dalam menciptakan keselarasan antara kepentingan tujuan manajer dan pemilik, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan yang dapat memicu konflik. Ketika manajer memiliki saham, mereka cenderung lebih fokus pada pengambilan keputusan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan

perusahaan, alih-alih hanya mengejar keuntungan jangka pendek yang mungkin tidak sejalan dengan harapan pemegang saham.

Manajemen yang memiliki saham perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena mereka akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang dapat mempengaruhi reputasi dan kinerja perusahaan. Karena kepemilikan manajerial sebagian besar tergantung pada kuantitas investasi yang dilakukan, maka kepemilikan manajerial menjadi sistem yang lebih efektif untuk melacak keberhasilan manajemen, membantu meminimalkan konflik antara prinsipal dan agen, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dalam pengelolaan perusahaan.

2.1.6 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah badan independen yang berasal dari luar perusahaan melakukan pengawasan dan menilai manajemen perusahaan serta bertugas sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan. Komisaris independen berperan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sama halnya seperti variabel Kepemilikan Manajerial, proporsi komisaris independen yang tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak karena mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap manajerial dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip akuntansi yang baik.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, kerangka berpikir peneliti diperkuat dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang digunakan sebagai acuan dari penelitian ini adalah penelitian yang berhubungan dengan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan *tax avoidance*. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Novita Sari, Elvira Luthan, dan Nini Syafriyeni (2020)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 20 dengan alat analisis yaitu analisis regresi linier berganda. Dengan hasil penelitian profitabilitas dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Sari Mustika Widyastuti, Inten Meutia, dan Aloysius Bagas Candrakanta (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, profitabilitas, *capital intensity*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan hasil penelitian profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Desy Amaliati Setiawan, Said Khaerul Wasif, Irfan Arif Husen, Rahmat Yuliansyah, dan Wanda Pebriani (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perdagangan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dengan temuan berupa profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. R. Wedi Rusmawan Kusumah, Fika Tri Haryati, dan Sri Wahyuni (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *good corporate governance* antara lain kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2020. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Dengan hasil penelitian berupa variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5. Muhammad Rifaldi Tanjung dan Muhammad Nuryatno Amin (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *leverage*, *corporate governance* antara lain komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian

ini adalah perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2021. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Dengan temuan berupa profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

6. Ayu Atakhyani, Sartika Wulandari, dan Muhammad Ali Ma'sum (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2021. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Dengan hasil penelitian variabel profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novita Sari, Elvira Luthan, dan Nini Syafriyeni. (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen,	Variabel Dependen: <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> Variabel	Profitabilitas dan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014- 2018	Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan	terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sementara <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan tidak menunjukkan pengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	Sari Mustika Widyastuti, Inten Meutia, dan Aloysius Bagas	<i>The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dewan Komisaris, Komite Audit, dan <i>Capital Intensity</i>

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Candrakanta. (2021)	<i>Corporate Governance on Tax Avoidance</i>	Independen: <i>Leverage, Profitability, Capital Intensity, dan Corporate Governance</i>	memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Setiawan dkk. (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, <i>Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Perusahaan Sektor	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, <i>Leverage, dan Profitabilitas.</i>	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Perdagangan Retail Yang Terdaftar Di Bei 2015 -2019)		
4	Kusumah dkk. (2022)	<i>The Effect Of Profitability, Leverage, And Good Corporate Governance On Tax Avoidance (Study On Energy Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (Idx) Period 2017- 2020)</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Profitability, <i>Leverage</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i>	Hanya variabel <i>leverage</i> yang berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Muhammad Rifaldi Tanjung dan Muhammad Nuryatno Amin. (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Corporate</i> <i>Governance</i> , dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Periode 2017- 2021	Variabel Dependen: <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Leverage</i> , <i>Corporate</i> <i>Governance</i> , dan Profitabilitas	<i>Leverage</i> , komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Ayu Atakhyani, Sartika Wulandari, dan	<i>The Impacts of</i> <i>Institutional</i> <i>Ownership</i> ,	Variabel Dependen: <i>Tax</i>	Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> memiliki

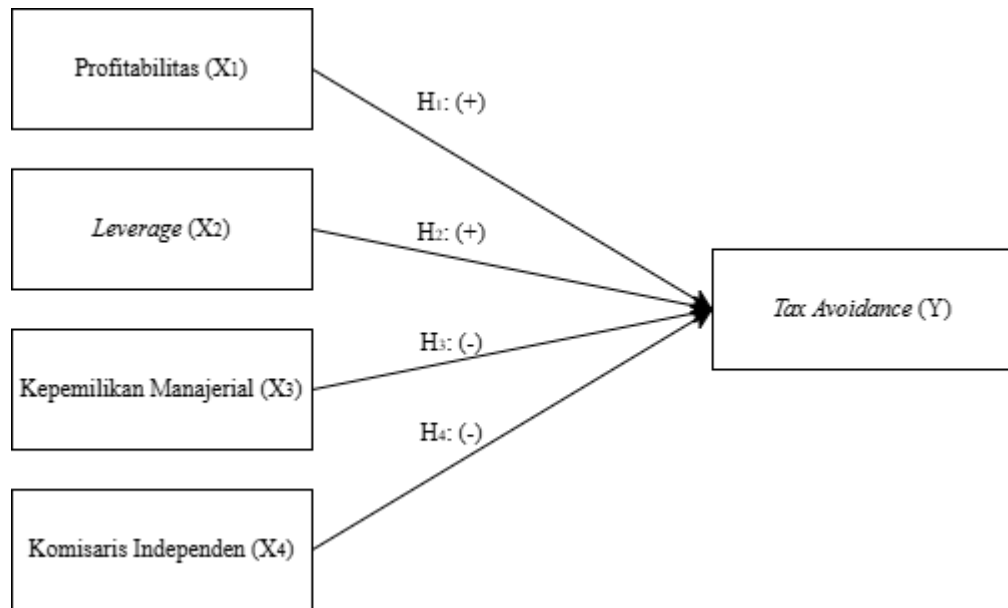
No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Muhammad Ali Ma'sum. (2023)	<i>Independent Board of Commissioners, Profitability and Leverage on Tax Avoidance</i>	<i>Avoidance</i> Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>	pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan Kepemilikan Institusional dan Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

Sumber: Diedit oleh Peneliti, 2024

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang mencakup hubungan antara variabel-variabel berikut ini telah dikembangkan dengan mempertimbangkan dampak merugikan dari profitabilitas dan *leverage* serta dampak menguntungkan dari *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Variabel Independen/Bebas : Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen

Variabel Dependen/Terikat : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.3 Hipotesis

Merujuk pada kerangka pemikiran di atas maka dapat disusun beberapa rumusan hipotesis antara lain sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula laba yang diperoleh, sehingga beban pajak yang dikenakan pun meningkat. Untuk memaksimalkan laba bersih, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung terdorong untuk

melakukan strategi penghindaran pajak agar kewajiban pajaknya menurun. Oleh karena itu, diduga bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak, perusahaan akan lebih terdorong untuk mencari celah hukum atau strategi penghindaran pajak guna mengurangi kewajiban pajak. *Tax avoidance* membantu perusahaan untuk menurunkan tagihan pajak mereka, yang tumbuh secara proporsional dengan laba (Saputri, 2018). Prasatya dkk. (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas sangat meningkatkan *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan pada tahun yang sama, seperti yang dilakukan oleh Badoa (2020), Sari dkk. (2020), dan Triyanti dkk. (2020), juga mendukung kesimpulan ini. Di tahun selanjutnya, Tanjaya dan Nazir (2021), Tanjung dan Amin (2022), serta Kurniawan dan Nurfauziah (2023) juga menggunakan hipotesis berupa adanya pengaruh positif profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Return on Assets (ROA) adalah ukuran profitabilitas perusahaan. ETR yang lebih rendah dikaitkan dengan ROA yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. (Darsani dan Sukartha, 2021)

H1: Profitabilitas berpengaruh POSITIF terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Para peneliti yang menggunakan konsep bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dalam penelitian mereka ialah antara lain Arianandini dan Ramantha (2018), Prasatya dkk. (2020), Badoa (2020), Sari dkk.

(2020), Tanjaya dan Nazir (2021), Dewi dan Oktaviani (2021), Tanjung dan Amin (2022), Kurniawan dan Nurfauziah (2023), dan Atkhyani dkk. (2023).

Leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana yang berasal dari utang untuk membiayai aktivitasnya. Penggunaan utang menghasilkan beban bunga yang bersifat *deductible* terhadap penghasilan kena pajak, sehingga dapat menurunkan laba kena pajak dan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, *leverage* menjadi alat yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak secara legal. Dengan demikian, semakin tinggi *leverage*, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Perhitungan *leverage* menggunakan DER sebagai indikator penggunaan hutang sebagai pendanaan perusahaan. Semakin tinggi DER, maka semakin rendah ETR. Rendahnya rasio ETR mengindikasikan bahwa cenderung melakukan penghindaran pajak.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa DER yang tinggi dari sebuah entitas menandakan utang yang besar dan modal yang rendah. Bahaya yang tinggi juga ditunjukkan oleh DER yang tinggi. Karena DER yang rendah menandakan status entitas secara umum aman dan tidak terlalu berbahaya, maka investor dan kreditor lebih memilih untuk menyukai entitas tersebut (Tanjaya dan Nazir, 2021).

H2: *Leverage* berpengaruh POSITIF terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hanuman (2008, dalam Putri dan Lawita, 2019), adanya tata kelola perusahaan atau *good corporate governace* yang baik sangat penting untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Selain itu, pelaksanaan mekanisme tata kelola perusahaan harus menjadi fokus utama agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Penerapan prosedur tata kelola yang efektif diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi secara keseluruhan karena hal ini terkait erat dengan kesejahteraan bisnis dan pemegang saham.

Dua indikator tata kelola perusahaan yang baik - kepemilikan manajerial dan komisaris independen - akan diteliti dalam penelitian ini. Kepemilikan manajerial, yang berasal dari manajer perusahaan, memainkan peran penting dalam mengawasi manajemen. Efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan dengan adanya kepemilikan ini. Kepemilikan bersama yang dipegang oleh manajer perusahaan disebut sebagai kepemilikan manajerial. Semakin banyak saham yang dimiliki manajer, maka semakin dekat keputusan manajemen perusahaan dimonitor.

Kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menurut Fadhila dkk. (2018). Banyak penelitian yang menggunakan hipotesis yang sama bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, termasuk Dhyapalonika (2018), Putri dan Lawita (2019), Septiana (2021), dan Ramdhan dan Dewi (2021).

Semakin besar kepemilikan manajerial, semakin besar pula keterlibatan manajer dalam kepentingan perusahaan sebagai prinsipal. Dalam teori agensi,

kondisi ini dapat mengurangi konflik kepentingan dan mendorong manajemen untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko dan tidak etis, karena manajer juga menanggung dampak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial diduga dapat mengurangi praktik *tax avoidance*.

Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi ETR. Tingginya rasio ETR mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak atau tingkat kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang rendah.

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh NEGATIF terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.3.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Kepentingan pemegang saham publik atau minoritas diwakili oleh komisaris independen. Karena pemegang saham publik mengharapkan perusahaan untuk mendukung pengembangan masyarakat, mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan. Untuk menghentikan *tax avoidance*, komisaris independen akan berusaha untuk memastikan bisnis membayar pajaknya (Puspita dan Harto, 2014 dalam Saputri, 2018). Hal ini dikuatkan oleh penelitian Prasatya dkk. (2020), yang menggunakan hipotesis bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sari dkk. (2020), Wati dan Astuti (2020), Pratomo dan Rana (2021), Dewi dan Oktaviani (2021), Yusminiarti dkk. (2021), Afrika (2021), Kusumawardhani dkk. (2023), dan Atakhyani dkk. (2023) merupakan beberapa penelitian lain yang menggunakan hipotesis yang sama.

Komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi manajemen secara objektif. Dalam teori agensi, peran ini penting untuk membatasi tindakan manajemen yang dapat merugikan pemilik, termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif. Komisaris independen diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

ETR meningkat seiring dengan persentase komisaris independen. Tingginya rasio ETR mengindikasikan bahwa perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak atau tingkat kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak yang rendah.

H4: Komisaris Independen berpengaruh NEGATIF terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)